JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR CAMAT BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Hindri Rusadi[1], Irza Setiawan[2], Mahdalina[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: rusadihindri9@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi salah satu wujud transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Meskipun telah diimplementasikan secara luas, pelaksanaan SIPD masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, di antaranya permasalahan stabilitas server, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta belum optimalnya dukungan infrastruktur teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi SIPD dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah pada Kantor Camat Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sepuluh informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sedangkan validitas data diuji melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi SIPD telah berlangsung dengan cukup baik berdasarkan dimensi support, capacity, dan value. Komitmen pimpinan serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi faktor yang mendorong keberhasilan implementasi, sementara keterbatasan kapasitas server, kualitas jaringan internet, dan kemampuan teknis sebagian aparatur masih menjadi hambatan yang perlu mendapat perhatian. Penerapan SIPD juga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi proses administrasi, transparansi pengelolaan keuangan, serta penguatan akuntabilitas keuangan daerah.

Kata Kunci: implementasi SIPD, akuntabilitas keuangan, pemerintah daerah

ABSTRACT

The implementation of the Regional Government Information System (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD) constitutes an integral part of digital government transformation designed to strengthen the effectiveness, transparency, and accountability of regional financial management. Despite its broad adoption, the implementation process continues to encounter a number of challenges, particularly those related to server reliability, limited human resource capabilities, and insufficient technological infrastructure. This study aims to examine the implementation of SIPD in supporting regional financial accountability at the Banjang District Office, Hulu Sungai Utara Regency. A descriptive qualitative approach was adopted in this research. Data were gathered through observation, in-depth interviews, and document analysis involving ten informants selected using a purposive sampling technique. The collected data were analyzed following the interactive model of Miles and Huberman, encompassing data reduction, data display, and conclusion drawing, while data trustworthiness was established through triangulation. The results reveal that the implementation of SIPD has performed reasonably well across the dimensions of support, capacity, and value. Leadership commitment and adherence to regulatory provisions emerged as the principal enabling factors, whereas limited server capacity,

unstable internet connectivity, and the technical proficiency of several government personnel remained the primary implementation constraints. Furthermore, SIPD has contributed to improving administrative efficiency, promoting transparency, and reinforcing regional financial accountability. These findings suggest that continuous investment in digital infrastructure, accompanied by sustained efforts to strengthen human resource capacity, is essential for ensuring the long-term effectiveness and sustainability of SIPD implementation.

***Keywords**: SIPD implementation, financial accountability, local government*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam upaya mewujudkan tata kelola yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Perubahan tersebut diwujudkan melalui penerapan electronic government (e-government), yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan mutu pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan efisiensi proses administrasi pemerintahan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transformasi digital tidak lagi hanya dipandang sebagai sarana mempercepat pekerjaan administratif, melainkan juga sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Atas dasar itu, pemerintah terus mengembangkan berbagai sistem informasi yang saling terintegrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan good governance, khususnya melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. SIPD merupakan sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan data pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, serta berbagai informasi pemerintahan lainnya ke dalam satu platform nasional. Kehadiran sistem ini diharapkan mampu meningkatkan sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mempercepat proses perencanaan maupun penganggaran, meminimalkan kesalahan administrasi, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, SIPD tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung reformasi birokrasi.

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di tingkat kecamatan, khususnya di kantor camat Banjang belum berjalan secara optimal, maka tujuan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah juga belum dapat tercapai secara maksimal. Hal ini dikarenakan kualitas kaporan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh ketepatan, kelengkapan, dan keakuratan data yang diinput kedalam sistem. Ketidak sesuaian data, keterlambatan penginputan, serta kurang optimalnya pemanfaatan sistem dapat berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, Implementasi SIPD di kantor Camat Banjang menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan guna mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis di lokasi penelitian, ditemukan beberapa fenomena sebagai berikut:

1. Gangguan server dan sistem terpusat menunjukan bahwa adanya risiko teknes pada arsitektur sistem yang terintegrasi secara nasional. Ketika server pusat mengalami *overload* atau *down*, proses penginputan, validasi, dan pelaporan data keuangan daerah menjadi terlambat. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada keterlambatan administrasi, tetapi juga berpotensi menganggu siklus perencanaan dan penganggaran daerah yang telah di tetapkan
2. Resistensi aparatur terhadap perubahan sistem juga tidak dapat diabaikan. Perubahan prosedur kerja sering kali persepsikan sebagai beban tambahan, terutama ketika sistem baru dianggap lebih kompleks atau belum sepenuhnya stabil. Dalam konteks implementasi kebijakan, dimensi disposisi (*disposition*) atau sikap pelaksana memegang peran penting.

Jika kometmen dan penerimaan aparatur terhadap kebijakan rendah, maka potensi keberhasilan implementasi akan ikut melemah meskipun regulasi dan instrumen teknis telah tersedia.

3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi jumlah maupun kualitas, semakin memperberat tantangan tersebut. Dibanyak unit kerja, penguasaan SIPD sering kali hanya dimiliki oleh satu atau dua operator. Ketergantungan pada individu tertentu menciptakan risiko institusional apabila terjadi mutasi, cuti, atau kendala lainya.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan SIPD memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, terutama dalam meningkatkan efektivitas proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Ekaputra (2021) menjelaskan bahwa SIPD mampu mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran sehingga menciptakan konsistensi data pembangunan daerah. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Winarno, Kusnadi, dan Afriliana (2019) yang menyatakan bahwa SIPD berperan dalam membangun basis data pembangunan yang terintegrasi sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Namun demikian, sejumlah penelitian terkini juga mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD masih dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, kualitas infrastruktur teknologi informasi, koordinasi antarlembaga, serta dukungan organisasi. Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi SIPD tidak hanya bergantung pada sistem yang digunakan, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan administratif dan perkembangan teknologi secara terpadu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah pada Kantor Camat Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan menggunakan perspektif *support, capacity, dan value*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi e-government dari sisi teoretis, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerapan SIPD. Dengan demikian, implementasi SIPD diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif untuk mengkaji implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah pada Kantor Camat Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Proses analisis didasarkan pada teori implementasi e-government yang dikemukakan oleh Harvard JFK School of Government dalam (Indrajit, 2016), yang menekankan tiga dimensi utama, yaitu support (dukungan), capacity (kapasitas), dan value (manfaat). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang diambil melalui teknik penarkan sampel secara *purposive sampling* dengan juamlah informan 10 orang (Sugiyono, 2016). Teknik analisis data yang digunakan mennggunakan model Miles &Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Husnu Abadi, 2020). Uji kredibilitas data pada penelitian ini meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan member check (Sugiyono, 2025).

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

PEMBAHASAN

A. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Kantor Camat Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara

Implementasi secara sederhananya dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Tingkat keberhasilan implementasi dapat diukur menggunakan teori-teori yang telah dicetuskan oleh para ahlinya. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian ini dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1. *Support* (Dukungan)

   Support merupakan bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah atau pimpinan organisasi dalam pelaksanaan e-government.

   a. *Political Will* (Komitmen Pimpinan)

      Analisisdata hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa indikator komitmen pimpinan dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kantor Camat Banjang termasuk dalam kategori baik. Komitmen tersebut tercermin dari peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan, melakukan pengawasan, membangun koordinasi, serta memberikan dukungan terhadap penerapan SIPD pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Keberadaan dukungan tersebut mampu mendorong aparatur untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara lebih tertib, disiplin, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan SIPD dapat berlangsung secara optimal.

   b. Aspek Legalitas

      Analisis hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa indikator komitmen pimpinan dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kantor Camat Banjang termasuk dalam kategori baik. Komitmen tersebut tercermin dari peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan, melakukan pengawasan, membangun koordinasi, serta memberikan dukungan terhadap penerapan SIPD pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Keberadaan dukungan tersebut mampu mendorong aparatur untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara lebih tertib, disiplin, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan SIPD dapat berlangsung secara optimal.

2. *Capacity* (Kapasitas)

   Capacity merupakan kemampuan organisasi dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan secara optimal.

   a. Ketersedian Sumber Daya/Alokasi Sumber Daya

      Analisis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengarah pada kesimpulan bahwa indikator alokasi sumber daya berada pada kategori baik. Pemerintah daerah telah menyediakan dukungan anggaran yang mendukung operasional SIPD sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berlangsung sesuai kebutuhan organisasi. Hal ini ditunjukkan oleh adanya landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan SIPD, yaitu Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Hal ini dapat dilihat jelas dari bunyi pada pasal 30 yang mengatur tentang pendanaan penyelanggaraan SIPD. Meskipun demikian, optimalisasi alokasi sumber daya tetap diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas implementasi SIPD secara berkelanjutan.

   b. Ketersediaan Infrastruktur

      Analisis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengarah pada kesimpulan bahwa indikator ketersediaan infrastruktur berada pada kategori cukup baik. Ketersediaan komputer, laptop, printer, jaringan internet, dan perangkat pendukung lainnya secara umum telah mendukung implementasi SIPD. Namun,

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

masih terdapat hambatan berupa gangguan server yang dikelola secara terpusat, ketidakstabilan jaringan internet, serta beberapa perangkat yang memerlukan peremajaan sehingga belum sepenuhnya mendukung kelancaran operasional sistem.

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Analisis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengarah pada kesimpulan bahwa indikator sumber daya manusia berada pada kategori cukup baik. Hal ini didukung oleh ketersediaan jumlah pegawai yang memadai dan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan SIPD. Meskipun demikian, kemampuan tersebut belum dimiliki secara merata oleh seluruh aparatur. Kondisi ini masih menyebabkan ketergantungan terhadap beberapa operator tertentu sehingga diperlukan upaya peningkatan kompetensi secara berkesinambungan agar seluruh aparatur mampu mengoperasikan SIPD secara optimal.

3. *Value* (Manfaat)

Value merupakan nilai atau manfaat yang diperoleh organisasi maupun masyarakat dari implementasi e-government. Semakin besar manfaat yang dirasakan, semakin tinggi tingkat keberhasilan penerapan e-government.

a. Efisiensi & Efektivitas

Analisis data hasil wawancara dan observasi, indikator efisiensi dan efektivitas termasuk dalam kategori cukup baik. Implementasi SIPD mampu mempercepat pelaksanaan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah. Selain membuat alur pekerjaan menjadi lebih sistematis, penerapan sistem ini juga membantu mengurangi potensi kesalahan administratif apabila dibandingkan dengan mekanisme yang digunakan sebelumnya.

b. Akuntabilitas & Transparansi

Analisis data hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa indikator akuntabilitas dan transparansi berada pada kategori cukup baik. Seluruh transaksi beserta data keuangan telah terdokumentasi secara sistematis melalui SIPD sehingga mempermudah pelaksanaan pengawasan, evaluasi, maupun penyusunan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan SIPD memberikan kontribusi positif terhadap terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.

c. Kepuasan Pengguna

Analisis data hasil wawancara dan observasi, indikator kepuasan pengguna dikategorikan cukup baik. Sebagian besar aparatur menilai bahwa penggunaan SIPD memberikan kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan, memperkuat koordinasi antarbagian, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, tingkat kepuasan pengguna masih dipengaruhi oleh sejumlah kendala teknis, seperti gangguan server, lambatnya akses terhadap sistem, serta adanya pembaruan fitur yang mengharuskan pengguna terus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Kantor Camat Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Kantor Camat Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diklasifikasikan menjadi dua katagori, yaitu faktor pendukung dan faktor pengahambat.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah faktor yang mendorong sehingga memperkuat terjadinya perilaku. Adapun faktor pendukung dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Kantor Camat Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu:

a. Komitmen Pimpinan

Komimen pimpinan yang kuat terhadap pelaksanaan sistem. Pimpinan secara aktif memberikan arahan kepada aparatur agar melaksanakan pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaannya. Komitmen tersebut berdampak pada meningkatnya koordinasi antarunit kerja serta mendorong aparatur untuk lebih disiplin dalam mengikuti prosedur pengelolaan keuangan berbasis digital. Temuan ini sejalan dengan pendapat Indrajit (2016) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi e-government sangat dipengaruhi oleh keberadaan political will serta dukungan organisasi yang berlangsung secara berkesinambungan.

Analisis data hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa komitmen pimpinan merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kantor Camat Banjang. Pimpinan secara aktif memberikan arahan kepada aparatur agar melaksanakan pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaannya. Komitmen tersebut berdampak pada meningkatnya koordinasi antarunit kerja serta mendorong aparatur untuk lebih disiplin dalam mengikuti prosedur pengelolaan keuangan berbasis digital. Temuan ini sejalan dengan pendapat Indrajit (2016) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi e-government sangat dipengaruhi oleh adanya political will serta dukungan organisasi yang berlangsung secara berkesinambungan.

b. Dukungan Regulasi dan Legalitas

Keberadaan regulasi yang jelas juga menjadi faktor yang memperkuat implementasi SIPD. Pelaksanaan sistem telah disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga seluruh proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan, dilaksanakan berdasarkan pedoman yang sama. Kejelasan regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparatur dalam menjalankan tugasnya sekaligus menciptakan keseragaman dan konsistensi dalam penerapan SIPD pada lingkungan pemerintah daerah.

Analisis data hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kejelasan regulasi menjadi faktor yang memperkuat implementasi SIPD. Pelaksanaan sistem telah mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga seluruh proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan, dilaksanakan berdasarkan pedoman yang sama. Kejelasan regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparatur dalam menjalankan tugasnya sekaligus menciptakan keseragaman dan konsistensi dalam penerapan SIPD di lingkungan pemerintah daerah. Dengan demikian, regulasi berfungsi sebagai pedoman yang menjamin implementasi SIPD berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

c. Ketersedian Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu unsur penting yang mendukung keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kantor Camat Banjang. Secara umum, sarana penunjang berupa komputer, laptop, printer, serta jaringan internet telah tersedia dan dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah berbasis digital. Kondisi tersebut

memberikan kemudahan bagi aparatur dalam menjalankan berbagai proses administrasi keuangan melalui SIPD. Meskipun demikian, pemanfaatan infrastruktur yang ada masih menghadapi sejumlah kendala sehingga belum dapat berfungsi secara maksimal. Beberapa permasalahan yang masih dijumpai meliputi gangguan pada server, kestabilan jaringan internet yang cenderung berubah-ubah, serta adanya sejumlah perangkat yang mengalami kerusakan. Berbagai kendala tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap kelancaran operasional SIPD dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Analisis data hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur juga menjadi faktor yang mendukung implementasi SIPD di Kantor Camat Banjang. Secara umum, sarana pendukung berupa komputer, laptop, printer, serta jaringan internet telah tersedia dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berbasis digital. Ketersediaan fasilitas tersebut memudahkan aparatur dalam mengoperasikan SIPD sehingga proses administrasi keuangan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat

Melakukan sebuah peningkatan pasti mendapatkan suatu hambatan atau kendala berikut uraian lebih lanjut menggali hal yang menjadi faktor dalam mempengaruhi Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Kantor Camat Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

a. Keterbatasan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor penghambat dalam implementasi SIPD di Kantor Camat Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini terlihat dari masih adanya pegawai yang belum sepenuhnya memahami penggunaan SIPD, terutama dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan sistem dan kebijakan yang terus diperbarui. Pegawai yang berusia lebih tua juga mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem berbasis digital sehingga membutuhkan pendampingan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan.

Analisis data hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi salah satu faktor penghambat implementasi SIPD. Meskipun sebagian besar aparatur telah mampu mengoperasikan sistem, masih terdapat beberapa pegawai yang belum sepenuhnya memahami penggunaan SIPD, terutama ketika terjadi perubahan fitur maupun mekanisme kerja dalam sistem. Selain itu, sebagian aparatur yang telah lama bekerja mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pemanfaatan teknologi digital sehingga masih memerlukan pendampingan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan.

b. Gangguan Server

Gangguan Server menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi SIPD. Kendala yang sering terjadi berupa server down, lambatnya akses sistem, dan gangguan pada jam sibuk maupun menjelang akhir tahun anggaran.

Analisis data hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa gangguan server SIPD juga menjadi hambatan yang cukup dominan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa server sering mengalami gangguan, seperti server down dan lambatnya akses sistem, terutama pada saat jam operasional yang padat maupun menjelang akhir tahun anggaran ketika intensitas penggunaan SIPD meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan proses input, verifikasi, dan pelaporan data keuangan mengalami keterlambatan sehingga memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi SIPD tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, tetapi juga

oleh keandalan infrastruktur teknologi yang menjadi penopang utama sistem informasi.

c. Pembaruan Sistem dan Adaptasi Pengguna

Pembaruan sistem dan adaptasi pengguna pada SIPD menjadi tantangan bagi pengguna dalam proses adaptasi. Adanya perubahan menu, fitur, maupun kebijakan baru mengharuskan pegawai untuk terus mempelajari dan menyesuaikan diri dengan sistem yang digunakan.

Analisis data hasil wawancara dan observasimenunjukkan bahwa pembaruan sistem dan kemampuan pengguna dalam beradaptasi merupakan faktor yang memengaruhi implementasi SIPD. Perubahan menu, penambahan fitur, serta penyesuaian kebijakan dalam sistem mengharuskan aparatur untuk terus mempelajari mekanisme baru agar mampu mengoperasikan SIPD secara optimal. Proses adaptasi tersebut memerlukan waktu dan tidak selalu dapat dilakukan secara cepat oleh seluruh pengguna, sehingga pada tahap tertentu dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, pembaruan sistem perlu diimbangi dengan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan yang berkelanjutan agar aparatur dapat mengikuti setiap perkembangan sistem tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

SIMPULAN

Dengan merujuk pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah pada Kantor Camat Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum telah berjalan dengan baik. Dengan menggunakan teori implementasi e-government Harvard JFK School of Government dalam Indrajit (2016) untuk mengukur implementasi SIPD, peneliti menemukan bahwa: *Pertama*, sub-variabel *support* (dukungan) berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh: (1) indikator komitmen pimpinan berada pada kategori baik karena pimpinan secara aktif memberikan arahan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan SIPD sehingga mendorong aparatur melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib dan sesuai ketentuan; dan (2) indikator aspek legalitas berada pada kategori baik karena implementasi SIPD telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. *Kedua*, sub-variabel *capacity* (kapasitas) berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh: (1) indikator alokasi sumber daya berada pada kategori baik karena dukungan sumber daya yang tersedia telah mampu menunjang pelaksanaan SIPD; (2) indikator ketersediaan infrastruktur berada pada kategori cukup baik karena sarana pendukung seperti komputer, laptop, printer, dan jaringan internet pada umumnya telah tersedia, meskipun masih ditemukan gangguan server, kualitas jaringan internet yang belum stabil, serta beberapa perangkat yang memerlukan pemeliharaan; dan (3) indikator sumber daya manusia berada pada kategori cukup baik karena sebagian besar aparatur telah mampu mengoperasikan SIPD, namun masih diperlukan peningkatan kompetensi agar seluruh aparatur mampu beradaptasi terhadap perkembangan dan pembaruan sistem. *Ketiga*, sub-variabel *value* (manfaat) berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh: (1) indikator efisiensi dan efektivitas berada pada kategori baik karena implementasi SIPD mampu mempercepat proses pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan efektivitas pekerjaan; (2) indikator akuntabilitas dan transparansi berada pada kategori baik karena SIPD menghasilkan pengelolaan data keuangan yang lebih terintegrasi, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri sehingga memperkuat pertanggungjawaban keuangan daerah; serta (3) indikator kepuasan pengguna berada pada kategori cukup baik karena sebagian besar aparatur merasakan manfaat SIPD dalam mendukung pelaksanaan tugas, meskipun masih dipengaruhi oleh beberapa kendala teknis dalam pengoperasian sistem.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi SIPD terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan yang kuat, aspek legalitas yang jelas, serta ketersediaan infrastruktur pendukung yang secara umum mampu menunjang pelaksanaan SIPD. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan kemampuan sebagian aparatur dalam mengoperasikan SIPD, gangguan server yang menyebabkan proses pengelolaan data tidak selalu berjalan optimal, serta perlunya adaptasi terhadap pembaruan sistem yang mengharuskan aparatur terus meningkatkan kompetensinya.

Saran dalam penelitian ini ditunjukan kepada: (1) Kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai pengembang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diharapkan terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan, terutama pada aspek kapasitas serta stabilitas server. Optimalisasi kualitas server perlu menjadi perhatian utama agar berbagai kendala teknis, seperti server down, akses sistem yang lambat, maupun penurunan kinerja ketika terjadi lonjakan pengguna, khususnya menjelang akhir tahun anggaran, dapat diminimalkan. Dengan kondisi sistem yang lebih andal, seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari proses penginputan data, verifikasi, hingga penyusunan laporan keuangan, dapat terlaksana secara lebih efektif tanpa mengalami hambatan yang berarti. (2) Kepada Camat Banjang diharapkan untuk terus memperkuat kompetensi sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis , serta pendampingan yang dilakukan secara berkesinambungan bagi seluruh aparatur yang menggunakan SIPD. Program peningkatan kapasitas tersebut sebaiknya tidak hanya diberikan pada tahap awal implementasi, tetapi juga dilaksanakan setiap kali terdapat pembaruan fitur maupun perubahan kebijakan dalam SIPD. Melalui upaya tersebut, kemampuan aparatur dalam mengoperasikan sistem diharapkan semakin meningkat, ketergantungan terhadap beberapa operator tertentu dapat dikurangi, serta potensi terjadinya kesalahan dalam proses pengelolaan keuangan daerah dapat diminimalkan. (3) Kepada Pengelola SIPD di tingkat daerah dan Kantor Camat Banjang perlu memperkuat mekanisme sosialisasi serta pendampingan setiap kali dilakukan pembaruan sistem. Penyampaian informasi mengenai perubahan fitur hendaknya didukung dengan penyusunan panduan penggunaan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh pengguna. Di samping itu, koordinasi yang lebih intensif dengan perangkat daerah terkait perlu terus ditingkatkan agar proses adaptasi terhadap perubahan sistem dapat berlangsung secara lebih cepat dan optimal. Dengan langkah tersebut, berbagai kendala yang timbul akibat pembaruan sistem diharapkan dapat ditekan, kesiapan aparatur dalam memanfaatkan SIPD semakin meningkat, serta implementasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel dapat terwujud secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Affrian, R. (2023). *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan* (1 ed.). Bintang Semesta Media.

Febriana, N. A. S., & Yuniarta, G. A. (2023). Analisis sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) sebagai alat evaluasi akuntabilitas pengelolaan keuangan: Studi kasus pada Kantor Camat Kubu. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 15(2).

Hardani et al. (2020) *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.

Hayat, U. S. (2023). Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam upaya mencegah terjadinya fraud. Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Sains, 3(2).

Indrajit, R.E. (2016) *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital.* Yogyakarta: Andi.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2019) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

Pramono, J. (2020) *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.

Sugiyono (2023) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.